



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADI SRIYONO

2. Jabatan : INSPEKTUR

3. NHK : 679278

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.852.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/363 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 907.500.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , WARISAN Rp. 390.000.000

3. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , WARISAN Rp. 120.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 14.000.000**

1. MOTOR, DUCATI SEPEDA MOTOR Tahun 1955, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR RODA 2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 22.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 35.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.923.500.000**

III. HUTANG **Rp. 510.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.413.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.